

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**Heni Waluyo Siswanto**

Peneliti Ahli Muda pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran,  
Balitbang, Kemendikbud  
email: hewalsi@yahoo.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait implementasi pendidikan karakter pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan dalam hal: 1) kebijakan; 2) bentuk implementasi; 3) ketercapaian pelaksanaan; dan 4) hambatan yang dihadapi. Terdapat sembilan perguruan tinggi yang dijadikan sampel yang dipilih dengan teknik purposive. Responden penelitian berjumlah 54 orang ditentukan secara purposive. Teknik analisis data menggunakan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi umumnya: 1) telah memiliki program pendidikan karakter secara baik; 2) memiliki beragam bentuk, pola, model, strategi, dan karya nyata terkait implementasi pendidikan karakter; 3) telah cukup berhasil dalam mengimplementasikan pendidikan karakter; dan 4) pendanaan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan karakter.

Kata Kunci: *karakter, implementasi, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan.*

## **THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION AT TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS**

### **Abstract**

*Abstract: This study aims to obtain information related to the implementation of character education in educational personnel educational institutions in terms of: 1) policies, 2) forms of implementation, 3) achievement of implementation, and 4) obstacles encountered. Nine universities to become the samples and fiftyfour respondents from such universities were selected purposively for the reseach. The results of the analysis show that in general the universities: 1) have had good program for character education; 2) have a variety of forms, patterns, models, strategies and real work related to the implementation of character education; 3) have been quite successful in implementing character education; and 4) have institutional funding as one of the factors that contributes to the implementation of character education.*

*Keywords: character, implementation, educational institutions, education staffs*

## **I. PENDAHULUAN**

Berita-berita merisaukan tentang kenakalan remaja yang berstatus pelajar belakang ini sering menghiasi media masa. Berita-berita itu antara lain tawuran antarpelajar, penyalahgunaan atau bahkan sebagai pengedar obat-obat terlarang, mabuk-mabukan dengan minuman oplosan sendiri, kebut-kebutan liar di jalan raya, hubungan seks bebas, aborsi, coret-coret dan perusakan pada sarana dan prasarana umum, nonton film porno yang berdampak tindak pemerkosaan, kasus *bullying* hingga menelan korban jiwa. Bahkan, di Kota Depok ditemukan kasus seorang pelajar SMP berusia lima belas tahun yang tewas gantung diri (<https://megapolitan.kompas.com>) diduga

akibat sering bolos sekolah. Beberapa catatan tersebut mengindikasikan bahwa penanaman pendidikan karakter di lembaga pendidikan masih belum berhasil. Ketidakberhasilan membentuk karakter peserta didik menurut Sjarkawi (2006) dalam bukunya *Pembentukan Kepribadian Anak*, disebabkan adanya moralitas yang rendah. Moralitas yang rendah antara lain disebabkan oleh pendidikan karakter di satuan pendidikan yang kurang efektif.

Berbagai narasi tersebut tentu memprihatinkan berbagai pihak yang berkepentingan di kementerian, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi baik ditingkat pusat, daerah, satuan pendidikan, maupun masyarakat. *Out put* pendidikan yang ditengarai memprihatinkan ini tentu menimbulkan dugaan bahwa capaian pendidikan karakter di satuan pendidikan juga masih belum kuat. Hal tersebut, diperkuat hasil kajian ketua Divisi Sosialisasi dan Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak menyimpulkan bahwa pendidikan karakter belum memiliki dampak kepada murid. “Maraknya tawuran pelajar, *bullying* di sekolah, narkoba, kejahatan seksual di sekolah dan siswa sebagai perokok aktif mengonfirmasi betapa pendidikan karakter di Indonesia sejak tahun 2010, belum memiliki dampak optimal bagi generasi muda. (<http://www.antaraneews.com/berita/459406>).

Analisis Priyono dan Maarif (2010). dalam buku *Penyusunan Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter* menyatakan bahwa berbagai fenomena negatif yang melanda peserta didik merupakan contoh konkret telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya dan sosial di kalangan pelajar sebagai tanda tindakan yang menyimpang. Tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan di kalangan remaja yang berstatus sebagai pelajar ini, seringkali orang awam akan mengkritik tentang apa yang selama ini dilakukan oleh tenaga pendidik (guru) di sekolah ? apakah orang tuanya tidak mengajari anaknya?. Pertanyaan seperti itu sering terlontar ketika terjadi kasus penyimpangan yang melibatkan pelajar baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun pada mahasiswa di perguruan tinggi. Semua ini bersumber pada karakter si pelaku yakni oknum pelajar atau mahasiswa dalam kehidupan kesehariannya.

Hal ini sesuai dengan yang dilansir oleh Nor (tanpa tahun), dimana telah terjadi krisis moral pada mahasiswa seperti berkurangnya perhatian mahasiswa pada waktu pelajaran, aktivitas nongrong, “*ngeceng*” dan keluyuran di mall, pesta narkoba, seks bebas, mengunjungi bar dan diskotik, tawuran dan terorisme, tidak menghargai dosen yang memberikan materi tetapi lebih disibukan dengan melakukan kegiatan sendiri seperti memainkan *Handphone* (HP) untuk *mengupdate* status di *facebook* atau *whatsapp* atau berbincang-bincang dengan teman, membolos sekolah lantaran tidak suka dengan guru atau dosennya atau lebih baik nongkrong di *mall*. Belum lagi “*nyontek*” ketika ujian karena tidak menguasai materi, atau *mengcopy paste* pekerjaan teman.

Pada hakikatnya, peraturan perundangan sudah menegaskan bahwa setiap warganegara bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan (UUSPN No.20 Tahun 2003 Pasal 6, Ayat (2)). Namun, kenyataannya seringkali terjadi lempar tuduhan bahwa seolah-olah keberhasilan pendidikan peserta didik baik pengetahuan, sikap dan keterampilannya semata-mata merupakan beban para pendidik atau sekolah. Tentu masih ada pihak lain seperti orangtua, masyarakat, yang seyogianya bersama-sama memiliki beban tanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik (Siswanto, 2011).

Berkaitan dengan hal tersebut, pada risalah ini penulis tidak ingin mengupas tentang kompetensi guru dalam mengajar di lingkup sekolah, namun lebih kepada pembahasan pada lingkup lembaga yang selama ini sebagai penghasil tenaga pendidik (guru), yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dimaksud lazimnya disebut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk selanjutnya akan disebut dengan akronim LPTK.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah utama, yaitu bagaimanaimplementasi pendidikan karakter di LPTK? Terutama ditinjau dari aspek kebijakan, bentuk implementasi, dan hambatan yang dilaksanakan lembaga dalam mendidik mahasiswanya. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan karakter di LPTK yang dimaksud pada aspek implementasi, kebijakan, dan hambatan.

Beberapa hasil studi tentang pendidikan karakter telah banyak dipublikasikan. Misalnya, penelitian Nor (tanpa tahun) yang menemukan belum begitu kuatnya penerapan integrasi pendidikan karakter dalam pendidikan IPS di perguruan tinggi. Temuan lainnya oleh Hasanah (2013), menyebutkan bahwa implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi adalah memilih nilai-nilai inti yang ada pada masing-masing jurusan/program studi. Implementasi nilai-nilai karakter inti tersebut dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yaitu terintegrasi dalam pembelajaran, manajemen pengelolaan jurusan dan program studi, serta pada kegiatan kemahasiswaan. Hasil temuan Ikhwanuddin (2012), menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter seperti nilai kerja keras dan kerja sama mampu meningkatkan *skill* dan prestasi belajar mahasiswa. Prestasi belajar dianggap sebagai efek samping pendidikan karakter pada proses pembelajaran.

Temuan penelitian Ida Farida (2012) menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat dikembangkan melalui nilai-nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dikatakan bahwa di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan karakter terintegrasi pada Tridharma perguruan tinggi. Temuan Chrisiana (2005), menyebutkan bahwa di jurusan teknik pembelajarannya dapat dirancang dengan muatan pendidikan karakter yang sistematis dan terintegrasi dalam kurikulum sebagai persiapan mahasiswa menuju ke dunia kerja. Beberapa kegiatan penelitian pada perguruan tinggi tersebut di atas umumnya lebih difokuskan pada implementasi pendidikan karakter pada LPTK, dan belum pada sisi kebijakan dan hambatan.

Model-model pendidikan karakter yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas didasarkan pada analisis meta yang menunjukkan bahwa model pendidikan karakter senantiasa harus disesuaikan dengan karakteristik lembaganya.

Kata 'pendidikan' secara etimologis berasal dari *educare* dalam bahasa Latin yang artinya "melatih". Kata *educare* dalam istilah pertanian juga dapat diartikan menyuburkan yakni mengolah tanah agar menjadi subur dan menumbuhkan tanaman yang baik. Dari istilah pertanian tersebut maka pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu untuk menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan mengarahkan. Khan (2010) menyatakan bahwa pendidikan dapat juga diartikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya dan juga lingkungannya.

Karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu *charassein* yang artinya mengukir (Munir, 2010). Berdasarkan pengertian itu, maka hasil dari mengukir adalah ukiran yang mempunyai sifat utama melekat kuat di atas benda yang diukir sehingga tidak mudah hilang, baik karena waktu atau

gesekan. Ini berbeda dengan gambar atau tulisan tinta yang hanya menempel di atas permukaan benda. Karena itulah, sifatnya juga berbeda dengan ukiran, terutama dalam hal ketahanan dan kekuatannya dalam menghadapi tantangan waktu. Tulisan dan gambar akan mudah aus atau hilang tanpa bekas. Sementara sifat ukiran tetap tertanam dan melekat, seperti ukiran pada kayu atau batu di bangunan candi. Begitu pula sifat karakter yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam makalah Sasongko (2010), Allport memaknai, "*Character is personality evaluated, and personality is character devaluated*". Bahkan, ia tidak membedakan secara signifikan antara *character* (watak) dan *personality* (kepribadian). Meski dimaknai similar, menurut Allport sesungguhnya pengertian kedua istilah ini dapat dibedakan. Watak, yaitu upaya orang menanamkan norma-norma moral dan nilai-nilai moral, atau mengadakan penilaian. Sementara, jika hanya sekadar ingin memberikan gambaran apa adanya, maka dipakai istilah kepribadian.

Pendapat Kretschmer menyebutkan bahwa karakter, yaitu kepribadian keseluruhan (totalitas) yang terbentuk oleh unsur-unsur dari dalam (dasar, keturunan, faktor-faktor endogen) dan unsur-unsur dari luar (pendidikan dan pengalaman, faktor-faktor eksogen), (Sumadi dalam Sasongko, 2010). Lebih lanjut, John Locke (dalam Sasongko, 2010) menyatakan ada beberapa aspek psikologis yang perlu diperhatikan dalam membentuk watak (*character*) anak, antara lain akal, pikiran, kemauan, perasaan, tanggapan, fantasi, ingatan, perhatian, pengamatan.

Sementara Kadarmanta (2010) pada buku Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa mendefinisikan bahwa karakter mengandung pengertian suatu kualitas positif dengan kepribadian khas yang dimiliki seseorang atau suatu bangsa, sehingga membuatnya memiliki reputasi.

Filsuf Yunani, Heraclitus, secara gamblang menjelaskan, *Character is destiny. Character shapes the destiny of an individual person. It shapes the destiny of a whole society* (dalam Lickona, 2004). Lebih lanjut dikatakan bahwa nasib (*destiny*) seseorang ditentukan oleh karakternya. Karakter juga membentuk nasib masyarakat secara luas.

Beberapa definisi yang dikemukakan, yang dimaksud karakter dalam risalah ini adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan (virtues) terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan karakter di LPTK adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga *civitas* akademika perguruan tinggi yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai terpuji, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia seutuhnya.

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008) diartikan sebagai pelaksanaan; penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas. Pelaksanaan atau penerapan yang dimaksudkan, yakni yang terkait dengan suatu kebijakan publik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Menurut Mawitjere (2013) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan

yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Implementasi tentang kebijakan yang dimaksud, misalnya dalam penerapan pendidikan karakter yang sudah diamanatkan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan. Menurut Winarni (2013), terkait dengan penerapan nilai-nilai, ada dua model yang dapat diaplikasikan. Pertama, membentuk kebiasaan rutin yang bermuatan nilai-nilai moral. Kedua, memberikan *reward* bagi mahasiswa yang menampilkan perilaku bernilai moral. Sementara, Farida (2012) pendidikan karakter hendaknya dirumuskan dalam kurikulum, diterapkan metode pendidikan, dan dipraktikkan dalam pembelajaran. Di dalam pelaksanaannya, inti kegiatan di perguruan tinggi hendaknya menyatu dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan berbasis pada karakter.

Pemikiran Ma'ruf (2012) terkait pendidikan karakter di LPTK menyatakan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi dalam implementasinya sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan dan dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan yang tertuang dalam berbagai kegiatan atau aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi (1) nilai-nilai karakter apa saja yang perlu ditanamkan, (2) apa saja muatan kurikulumnya, dan (3) bagaimana proses pembelajarannya. Selanjutnya, didukung pula oleh alat dan lingkungan yang didukung oleh para pimpinan, dosen, karyawan, dan komponen-komponen lainnya secara sinergis.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut KBBI (2008), kebijakan memiliki arti kepandaian; kemahiran; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran; garis haluan;

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini yaitu tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh pemerintah terkait dengan suatu kebijakan.

KBBI (2008) menyebutkan hambatan memiliki makna rintangan, kayu penghalang. Dengan kata lain, hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan hambatan, yaitu sesuatu kendala atau rintangan yang menghalangi proses pelaksanaan tujuan yang sedang diterapkan. Dalam konteks ini, yakni implementasi pendidikan karakter.

Pembangunan pendidikan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan (5) melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025). Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu telah ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal tersebut sudah tertuang pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan karakter sebagai prioritas program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010). Isi dari rencana aksi tersebut adalah bahwa pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik & mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau *loving good (moral feeling)*, dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter menekankan pada *habit* atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan (Lickona, 2004).

Oleh karena itu, pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan karakter hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang.

Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, tokoh agama, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009).

Meskipun telah terdapat 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun dalam implementasinya jumlah dan jenis karakter yang dipilih tentu akan dapat berbeda antara satu daerah atau perguruan tinggi yang satu dengan yang lain. Di antara berbagai nilai yang dikembangkan, dalam pelaksanaannya dapat dimulai dari nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing LPTK. Misalnya dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Tujuan dari masing-masing LPTK.

LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan. Hal tersebut secara eksplisit tertuang pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden. Instrumen berisi pertanyaan-pertanyaan kebijakan fakultas dan bentuk pelaksanaan pendidikan pendidikan karakter di masing-masing program studi, dan hambatan yang dihadapi.

LPTK yang dijadikan sebagai sampel dilakukan secara *purposive* yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Dari daerah sampel tersebut ditentukan sebanyak sembilan perguruan tinggi, yaitu 1) Universitas Pendidikan Indonesia, 2) Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 3) Universitas Negeri Yogyakarta, 4) Universitas Negeri Surabaya, 5) Universitas Negeri Medan, 6) Universitas Negeri Padang, 7) Universitas Lambung Mangkurat, 8) Universitas Negeri Manado, dan 9) FKIP Mataram. Penelitian dilakukan pada bulan September tahun 2012. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif. Responden berjumlah 54 orang unturnya terdiri atas dekan, pembantu dekan, ketua jurusan, kepala program studi, dan dosen.

## II. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut deskripsi hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi pendidikan karakter di LPTK ditinjau dari sudut pandang: 1) kebijakan, 2) bentuk implementasi, 3) ketercapaian pelaksanaan, dan 4) hambatan yang dihadapi.

### A. Kebijakan

Melalui wawancara dan pengisian kuesioner diperoleh gambaran data kebijakan yang disajikan pada Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1. Data Terkait Kebijakan

No.	Aspek	Ya	Tidak	Abstain
1	KEBIJAKAN			
	a. Ada kebijakan lembaga terkait pendidikan karakter	85,19%	11,11%	2%
	b. Ada kebijakan kapasitas SDM bidang pendidikan karakter	90,79%	9,26%	-
	c. Ada kebijakan melakukan sosialisasi penerapan pendidikan karakter	92,59%	7,41%	-
	d. Ada anggaran bagi pengembangan pendidikan karakter di lembaga	81,48%	14,82%	3,7%
	e. Ada kebijakan mengikutsertakan dosen mengikuti ToT di lembaga	83,33%	14,82%	1,85%
	f. Ada kebijakan untuk melakukan analisis konteks terkait program pendidikan karakter	87,04%	9,26%	3,7%

Berdasar data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa LPTK umumnya telah memiliki program kebijakan secara tertulis terkait dengan pendidikan karakter. Program tersebut diperkuat dengan adanya temuan pengiring pada saat wawancara bahwa kebijakan merupakan suatu keniscayaan yang harus disosialisasikan secara baik kepada civitas akademika. Hal ini dapat ditemukan data dari Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya.

Hasil penelitian sebagaimana yang diungkap di atas menunjukkan bahwa LPTK pada umumnya memiliki program kebijakan terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter di kampus melalui berbagai bentuk kebijakan, misalnya dengan menganggarkan dana, melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) terutama para dosen, dengan cara mengirimkan untuk mengikuti ToT pada instansi terkait. Hasil dari kegiatan tersebut selalu disosialisasikan kepada rekan sejawat di masing-masing fakultas. Dengan berbekal hasil dari ToT di bidang pendidikan karakter, pada gilirannya para dosen akan mampu merancang implementasi pendidikan karakter secara baik, yang salah satunya adalah melakukan analisis konteks terkait dengan program pendidikan karakter.

Berdasarkan temuan tersebut, memiliki makna bahwa program pendidikan karakter yang direncanakan telah pula dibuat menjadi suatu kebijakan secara baik, hal ini menunjukkan bahwa

perguruan tinggi di Indonesia, terutama beberapa LPTK telah berupaya mengembangkan pendidikan karakter yang diyakini sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengarahkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang sekaligus sebagai warga negara yang baik. Hal tersebut selaras dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003), bahwa pendidikan hendaknya menghasilkan: 1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; 2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan 3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan kata lain, kebijakan yang diusung oleh beberapa perguruan tinggi tersebut memiliki makna bahwa perkuliahan di kampus tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan dan pengetahuan yang bermuara pada kreativitas dan kompetensi mahasiswa dalam memahami ilmu pengetahuan dan sains yang berpijak pada mengobservasi lingkungan, memilah, meneliti alam sekitar serta mampu berinovasi melahirkan hal-hal baru berkat kreativitas yang diasah sehingga bisa menemukan penemuan baru. Akan tetapi, juga menitikberatkan pada menanamkan moralitas dan budi pekerti ke dalam diri mereka yang berbuah pada sikap akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkehidupan mengglobal.

Sesuatu program kebijakan yang baru sebagai arah perilaku karakter mahasiswa di beberapa lembaga LPTK dapat pula dicitrakan memiliki kandungan menjadi *human competence*, merupakan sarana transformasi ilmu pengetahuan dan penguatan keterampilan, penguatan norma dan nilai dalam masyarakat, baik budaya, agama, maupun ideologi. Dalam arti, program kebijakan tersebut fokus terhadap dua hal. Pertama, kecakapan dalam mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari sehingga mahasiswa tidak sekadar belajar teori di kampus. Kedua, memiliki moralitas yang jelas arahnya sehingga ke depan lulusan lembaga penghasil guru Indonesia tidak hanya berpendidikan dan cerdas, tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia.

Temuan studi tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dimaknai oleh LPTK sebagai sesuatu hal yang penting dalam suatu lembaga pendidikan yang menurut Lickona, Schaps, & Lewis (2003) dalam *The Character Education Partnership* harus menyusun 11 prinsip pendidikan karakter yang efektif yaitu: 1) mempromosikan nilai-nilai kode etik berdasarkan karakter positif; 2) mendefinisikan karakter secara komprehensif untuk berpikir, berperasaan dan berperilaku; 3) menggunakan pendekatan yang efektif, komprehensif, intensif dan proaktif; 4) menciptakan komunitas sekolah yang penuh kepedulian; 5) menyediakan kesempatan kepada siswa untuk melakukan dan mengembangkan tindakan bermoral; 6) menyusun kurikulum yang menantang dan bermakna untuk membantu agar semua siswa dapat mencapai kesuksesan; 7) membangkitkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar dan menjadi orang yang baik di lingkungannya; 8) menganjurkan semua guru sebagai komunitas yang profesional dan bermoral dalam proses pembelajaran; 9) merangsang tumbuhnya kepemimpinan yang transformasional untuk mengembangkan pendidikan karakter sepanjang hayat; 10) melibatkan anggota keluarga dan masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan karakter; 11) mengevaluasi karakter untuk memperoleh informasi dan merancang usaha-usaha pendidikan karakter selanjutnya.

Dengan demikian, kebijakan tersebut akan memandu komunitasnya untuk merasakan arah dan manfaat dalam mengembangkan kebijakan pendidikan karakter di kampus. Di samping

itu, dengan adanya kebijakan pengimplementasian pendidikan karakter yang dibangun penuh dengan kesungguhan maka pada gilirannya akan meningkatkan SDM di kampus tersebut, seperti pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik (Dye 1981; Anderson, 1979; dalam Taufiqurokhman, 2014).

Pentingnya kebijakan publik dalam sebuah organisasi kampus yang tak bisa dilepaskan dengan kebijakan makro yang bernama negara karena sejatinya keberadaan organisasi itu juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan tersebut biasanya dituangkan dalam konstitusi jika sebuah negara atau anggaran dasar jika itu organisasi privat. Begitu juga tujuan sebuah kebijakan yang lebih operasional biasanya dituangkan dalam konsiderans atau pasal-pasal umum dari kebijakan tersebut. Prinsipnya, diantara tujuan itu tidak boleh bertentangan, baik dengan kebijakan yang lebih tinggi atau kebijakan yang menjadi acuannya serta di dalam kebijakan itu sendiri (Rusli, 2013). Dengan demikian, keberadaan suatu lembaga tentu ada aturan main yang diberlakukan untuk operasionalnya. Ini menjadi rambu-rambu bagi pelaksana untuk menggerakkan potensi yang ada di lembaga tersebut.

Dengan temuan yang diungkap di atas, dapat dimaknai civitas akademika menyadari bahwa pendidikan juga dipandang sebagai sebuah sistem sosial, artinya dikatakan sistem sosial disebabkan di dalamnya berkumpul manusia yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk menuju pada pendidikan yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu dengan cara melakukan perubahan susunan dan proses dari bagian yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Sehingga pendidikan sebagai agen perubahan sosial diharapkan peranannya mampu mewujudkan perubahan nilai-nilai sikap, moral, pola pikir, perilaku intelektual, ketrampilan, dan wawasan para peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, mutlak memerlukan kebijakan yang berpihak.

Keberpihakan yang dibangun karena kampus menyadari pula bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang *good and smart*. Atau manusia yang memiliki karakter yang baik (*good character*). Dalam bahasa sederhana, merubah manusia menjadi lebih baik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan begitu, pendidikan bertujuan tidak sekedar proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sekaligus sebagai proses alih nilai (*transfer of value*). Artinya, LPTK, di samping proses pertalian dan transmisi pengetahuan, juga berkaitan dengan proses perkembangan dan pembentukan kepribadian atau karakter masyarakat.

Selain itu, dalam kebijakan pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah kemampuan manusia atau masyarakat untuk dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Misi utama pendidikan tersebut sejalan dengan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.

Di Indonesia kebijakan pendidikan Karakter termuat dalam kebijakan pendidikan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini menyebutkan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Makna dalam kebijakan sistem pendidikan nasional mengharapkan bahwa mahasiswa bukan hanya memahami pendidikan secara akademik tetapi juga diharapkan mampu mempunyai karakter atau pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang disebut sebagai pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter diharapkan mahasiswa mampu menumbuhkan karakter pada saat menjalankan kehidupannya. Dengan kata lain, mahasiswa tidak hanya memahami pendidikan nilai sebagai bentuk pengetahuan, namun juga menjadikannya sebagai bagian dari hidup dan secara sadar hidup berdasarkan pada nilai tersebut. Tujuan Pendidikan karakter ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa guna memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas.

Kebijakan yang telah digulirkan oleh LPTK sebaiknya dipandu oleh narasi kajian [Shirley Yeung](#) (2011) yang memberi ilustrasi secara jelas bahwa pada saat lembaga pendidikan memiliki suatu kebijakan, pertanyaannya adalah bagaimana fungsi kebijakan evaluasi institusi pendidikan dapat membantu membuat perguruan tinggi turut bertanggung jawab kepada masyarakat. Apakah hal tersebut sudah diperhatikan?.

## B. Bentuk Implementasi

Terkait bentuk implementasi pendidikan karakter, data dari wawancara dan diperkaya dengan kuesioner digambarkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Terkait Implementasi

2.	Implementasi	Ya	Tidak	Abstain
	a. Ada pengembangan buku pedoman pelaksanaan program pendidikan karakter	68,52%	25,93%	5,56%
	b. Ada pengembangan konten pendidikan karakter sebagai mata kuliah tersendiri	55,56%	40,74%	3,7%
	c. Ada karya/aksi nyata dampak pembelajaran bertema pendidikan karakter. Gabung poin c dan f	87,04%	11,11%	1,85%
	d. Ada kemitraan dengan pihak luar dan pengembangan pendidikan karakter	75,93%	20,37%	3,70%
	e. Ada studi khusus tentang pendidikan karakter di lembaga	51,86%	48,15%	-
	f. Ada aksi nyata di lembaga terkait dengan;			
	• pencegahan HIV/AIDS	62,96%	33,33%	3,7%
	• program kesehatan reproduksi	68,52%	22,22%	9,26%
	• program pencegahan NAPZA	68,52%	29,63%	1,85%
	• pembiasaan pelestarian lingkungan	75,93%	22,22%	1,85%
	g. Aksi Ada latihan mitigasi bencana	22,22%	72,22%	5,56%

2.	Implementasi	Ya	Tidak	Abstain
	h. Aksi Ada efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, plastik, dan bahan lain	77,78%	20,37%	1,85%
	i. Aksi Ada kegiatan terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan sehat	94,44%	5,56%	-
	j. Ada program yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sendiri sesuai potensi, bakat, minat mahasiswa. (poin J dan K gabung)	98,15%	1,85%	-
	k. Ada memberi kesempatan dan hak yang sama bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi, potensi, bakat, dan minat mahasiswa	100%	-	-
	l. Lembaga memberi perlindungan bagi warga kampus yang mendapat perbedaan, pengucilan, dan pembatasan	81,48%	16,67%	1,85%
	m. Lembaga memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk berorganisasi dan mengeluarkan pendapat	100%	-	-
	n. Lembaga menetapkan nilai-nilai positif yang diprioritaskan dikembangkan di kampus	96,30%	3,70%	-
	o. Lembaga mengondisikan pelaksanaan pendidikan karakter:			
	• menyediakan sarana ibadah	98,15%	1,85%	-
	• menyediakan alat kebersihan	96,30%	3,70%	-
	• menyediakan kotak penemuan barang	27,78%	64,82%	-
	• menyelenggarakan upacara bendera	85,19%	14,82%	9,30%
	• memberi kesempatan melaksanakan ibadah bersama	94,44%	5,56%	-
	• penerapan pendidikan karakter di lembaga	70,37%	20,37%	-
	• penyelenggaraan pelatihan tentang kewirausahaan dan ekonomi kreatif di kalangan mahasiswa	98,15%	1,85%	-
	• ada kerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan pengembangan mental kewirausahaan di kalangan mahasiswa	75,93%	24,07%	-
	• ada alokasi dana untuk mendukung mahasiswa yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha kreatif	88,89%	9,26%	1,85%
	• ada monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan program pendidikan karakter di lembaga	74,07%	24,07%	1,85%
	• ada tindak lanjut monitoring dan evaluasi pendidikan karakter	74,07%	24,07%	1,85%
	• lembaga melakukan pembinaan berkesinambungan terhadap mahasiswa yang menerima bantuan dana pengembangan usaha kreatif	68,52%	25,93%	5,56%

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat ditarik benang merah bahwa LPTK umumnya memiliki bentuk-bentuk implementasi pendidikan karakter yang tidak sama. Namun, satu hal yang menarik adalah bahwa di setiap LPTK karakter berdemokrasi memperoleh porsi yang tinggi (100%), kemudian disusul ada program yang jelas (98,15%), menyediakan sarana ibadah bagi yang beragama Islam (98,15%), kampus memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pelatihan dalam rangka penanaman karakter (98,15%), ada program bakti sosial, misalnya kegiatan terciptanya

lingkungan kampus yang bersih dan sehat (94,44%), dan nilai-nilai positif untuk kemasyarakatan dan sosial senantiasa dikembangkan di kampus secara terstruktur, sistematis, dan masif (96,30%).

Di samping itu, dimensi-dimensi lainnya terkait dengan pemantapan implementasi karakter rata-rata (82,43%) juga dikembangkan. Hal itu seperti pengembangan buku pedoman pelaksanaan program pendidikan karakter, penyusunan konten nilai dan moral karakter, ada karya/aksi nyata yang dikemas berdampak pada hasil pembelajaran bertema pendidikan karakter, ada membangun dengan mitra kampus dalam menginternalisasikan nilai-nilai, pendidikan, akan intervensi manakala terdapat indikasi perlakuan yang diskriminasi, dan lain sebagainya.

Beberapa aspek yang ditemukan yang bermakna menguatkan implementasi pendidikan karakter di LPTK menunjukkan bahwa kampus umumnya memiliki kebijakan untuk melakukan penguatan nilai karakter dengan beragam cara. Hal ini ditunjukkan bahwa tenaga pendidik yang dikirim ke tempat pelatihan tentang pendidikan karakter memiliki tugas untuk membagi ilmunya kepada teman dosen yang lain. Pada konteks ini, kesimpulan [Karakhanyan](#), et al. (2012) dapat dijadikan rujukan, yakni bahwa, tidak relevan perubahan *top-down* atau *bottom-up*, bisa menjadi kurang berhasil jika pengetahuan perubahan dari komunitas pelaksana aktual tidak dipertimbangkan, tidak terjadi dialog aktif dengan pelaksana aktual dari perubahan dan implementasi perubahan kebijakan tidak dilibatkan dalam proses implementasi.

Kebijakan implementasi seperti ini sangat bagus mengingat bahwa tidak banyak pendidik/dosen yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi tentang pendidikan karakter yang diikutinya dalam acara pelatihan. Ketika ia berbagi ilmu tersebut kepada orang lain, disamping dapat mengasah pemahaman bagi si pembagi ilmu, dan menjadi ladang amal baik bagi yang bersangkutan, informasi tersebut bisa tersebar kepada pendidik/dosen yang lainnya.

Model berbagi yang umumnya dilakukan para dosen di LPTK selaras dengan Hollingshead (2009) dalam model “Kerangka untuk Memeriksa Implementasi Program Pendidikan Karakter” memberi uraian bahwa lembaga pendidikan harus mempunyai prinsip dan strategi berbagi, yang dia sebut dengan istilah CBAM (*concerns-based adoption model*) yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan proses perubahan selama tahun pertama penerapan program pendidikan karakter di seluruh distrik di Rockwall, Texas.

Nampak bahwa implementasi pendidikan karakter di kampus pada umumnya tidak semata berhenti pada tataran dokumen, namun diterapkan dalam aksi nyata, seperti pencegahan HIV/AIDS, program kesehatan reproduksi, program pencegahan NAPZA, pembiasaan pelestarian lingkungan, latihan mitigasi bencana, efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, plastik, dan bahan lain, lingkungan kampus yang bersih dan sehat, menyelenggarakan upacara bendera, memberi kesempatan melaksanakan ibadah bersama, pelatihan tentang kewirausahaan dan ekonomi kreatif di kalangan mahasiswa.

### C. Hambatan

Upaya mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter, pada LPTK ditengarai bukan perkara mudah. Kebiasaan aktivitas pembelajaran tenaga pendidik yang selama ini terjadi pada komunitas LPTK cenderung menempatkan model implementasi yang dikembangkan ditempatkan dalam posisi “pesanan kegiatan” dari pusat. LPTK umumnya belum menyadari bahwa misi utama pendidikan adalah membentuk karakter sehingga mereka nampak kurang gigih dan

kurang semangat dalam pengimplementasian nilai-nilai yang ingin dicitrakannya. Sementara jika memerhatikan kekhasan LPTK dapat dilihat dari visi, misi, dan tujuan dari LPTK tersebut yang tentu mengandung nilai-nilai luhur yang diperjuangkan. Hal tersebut diperkuat adanya data bahwa isu-isu pendanaan, keberadaan tenaga ahli pendidikan karakter, adanya program pelatihan bagi dosen, dan kelengkapan buku-buku referensi atau modul serta panduan pelaksanaan pendidikan karakter masih menjadi kendala yang rata-rata masih tinggi (di atas 50%), lihat Tabel 3.

Tabel 3. Terkait Data Hambatan

3	Hambatan	Ya	Tidak	Abstain
	Kendala yang dihadapi oleh lembaga terkait dengan implementasi yakni sebagai berikut:			
	a. dana (1)	68,52%	29,62%	1,85%
	b. tenaga ahli (4)	37,04%	57,41%	5,56%
	c. pelatihan (2)	57,41%	40,74%	1,85%
	d. buku/modul/panduan pelaksanaan (3)	55,56%	40,74%	3,70%

Berbagai hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter itu, ditengarai tidak hanya dalam hal empat komponen tersebut, tetapi juga sangat mungkin saat pendidik dan tenaga kependidikan harus membudayakan dalam kampus. Beberapa LPTK juga merasakan kurang asanya dukungan dari berbagai pihak berkepentingan terhadap keberadaan kampus mereka. Hal ini diperkuat oleh data yang menggambarkan bahwa terdapat persepsi beberapa pimpinan kampus selama melaksanakan program implementasi pendidikan karakter belum pernah merasakan ada bantuan secara konkret dari pemangku kepentingan terkait.

Di sisi lain, keterlibatan orangtua mahasiswa dalam membudayakan suatu nilai-nilai dari kampus, baik ke rumah maupun ke masyarakat juga belum mendapat tanggapan yang signifikan. Para orangtua umumnya mempersepsi bahwa perilaku yang diterapkan di kampus masih merupakan “pekerjaan perguruan tinggi” sehingga tidak perlu dibawa ke rumah.

Demikian pula perilaku keteladanan dari manajemen kampus maupun pembina instansi terkait lain juga belum menampakkan kesadaran secara terus menerus, konsisten dan bertanggung jawab, baik komitmen, mutu, prakarsa, dan peran serta kepada komunitas LPTK maupun orangtua mahasiswa serta masyarakat sekitar.

Narasi yang dikemukakan di atas merupakan sekelumit hambatan yang mencuat pada saat wawancara dilakukan. Berbagai hambatan tersebut dapat dikurangi apabila dari awal LPTK melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan secara baik. Untuk mengurangi dampak dari hambatan-hambatan sebagaimana diungkap di awal paragraf, hasil penelitian McIntosh, et al. (2013) nampaknya dapat dijadikan rujukan untuk implementasi awal. McIntosh, et al. (2013) dengan penelitian yang diberi judul “[Perceptions of Contextual Features Related to Implementation and Sustainability of School-Wide Positive Behavior Support](#)” yang dimuat dalam *Journal of Positive Behavior Interventions*, vol. 16, menyimpulkan bahwa dukungan administrator dan fungsi tim LPTK dinilai sebagai agen yang paling penting untuk implementasi awal dan keberlanjutan pendidikan karakter, sedangkan hambatan untuk *School-Wide Positive Behavior Support* (SWPBS) dinilai relatif kurang penting. Dukungan staf, integrasi ke dalam praktik biasa saja,

dan keterlibatan orangtua mahasiswa dinilai secara signifikan lebih penting bagi keberlanjutan daripada implementasi awal implementasi pendidikan karakter.

#### **D. Ketercapaian Implementasi**

Berdasarkan narasi pembahasan tentang kebijakan, bentuk implementasi, dan hambatan implementasi pendidikan karakter di atas dapat disintesis bahwa LPTK umumnya telah cukup berhasil dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator, seperti adanya kebijakan, adanya program, adanya rencana aksi, adanya sarana dan prasarana pendukung, adanya dukungan manajemen kampus, dan terdapat keterlibatan berbagai pihak kepentingan terkait.

Temuan tersebut memberi pesan bahwa upaya kampus menuju transformasi menjadi warga negara yang berakhlak mulia, berkarakter, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, minat luas dalam kehidupan, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, dan memiliki rasa tanggung-jawab terhadap lingkungan, hasil dari kerja keras, mulai menghasilkan ketercapaian yang positif.

Hasil tersebut sekaligus memberi gambaran makna bahwa tujuan awal diterapkannya pendidikan karakter oleh pemerintah, yaitu mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang baik, bermoral, dan berperilaku sesuai norma dan etika serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia nampak mulai berhasil. Upaya peningkatan karakter mahasiswa di LPTK yang selama ini telah dilakukan dengan menata ulang program, bentuk, dan penggalan sumber daya pendidikan yang dirancang untuk tujuan masa depan, telah mulai menampakkan hasil: kini dampaknya dapat memberi gambaran pada mahasiswa posisi tawar yang lebih kuat dalam berinteraksi dengan masyarakat lain, entah dalam berdagang, menjadi karyawan, menjadi guru atau dalam pergaulan jelas menjadi pergumulannya.

Dalam konteks temuan di atas, jelas bahwa implementasi pendidikan karakter yang telah dijalani di sembilan LPTK menjadi penting dan bermakna. Sebab, transformasi pengetahuan untuk menjadi bangsa yang cerdas, kreatif, beradab, dan terhormat mutlak memerlukan internalisasi nilai dan moral sebagai medianya. Untuk menjangkau kebahagiaan hidup bangsa di masa depan, tentunya seseorang dituntut agar dapat mengembangkan naluri kreativitasnya, yaitu dalam rangka mengantisipasi dan memperoleh solusi-solusi yang tepat dalam rangka pemecahan masalah. Semangat itu pula yang melandasi gerak langkah implementasi pendidikan karakter di LPTK. Gerak langkah itu dirumuskan dalam cita-cita untuk ikut mencerdaskan, memajukan, dan membangun bangsa dan masyarakat Indonesia yang pancasilais.

Keberhasilan implementasi pendidikan karakter memiliki pola yang beragam. Namun, untuk di sekolah baik pada prasekolah, pendidikan dasar dan menengah, beberapa hasil penelitian menunjukkan, implementasi pendidikan karakter di sekolah umumnya dilaksanakan secara terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan, dan pembudayaan sekolah (Nurchotimah, 2013; Uliana dan Setyowati, 2013; Zulhijrah, 2015; Wiliandani, dkk., 2016; Mustoip, dkk., 2018).

Pada perguruan tinggi implementasi pendidikan karakter juga tidak jauh berbeda dengan di sekolah. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat diimplementasikan dengan model melalui 1) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yakni dengan mengintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui berbagai mata kuliah baik secara parsial maupun terpadu dalam kelompok tertentu, 2) pelaksanaan kegiatan pembiasaan keseharian yang berada di kampus, melalui pengembangan budaya/kultur kampus untuk pengembangan pendidikan karakter, 3) pelaksanaan ekstrakurikuler dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pendidikan kepramukaan, olah raga, seni, keagamaan, dan lain-lain, dan 4) kegiatan pembiasaan keseharian di kampus dan rumah dilakukan dengan memberdayakan dukungan orangtua dan masyarakat (Asyanti, 2012; Zuchdi, 2012; Hasanah, 2013; Rai, 2016; Samal, 2018).

Pendidikan karakter bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga merasakan dengan baik atau *loving good* (*moral feeling*), dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter menekankan pada *habit* atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan (Lickona, dalam Siswanto, 2011).

Keberhasilan maupun ketidakberhasilan implementasi pendidikan karakter akan memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Ellias (2010) menyatakan melalui pengembangan karakter moral, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, mencegah *bullying* dan *viktimisasi* oleh teman sebaya, menurunkannya masalah pelanggaran disiplin, mengurangi ketidakjujuran, mendukung pengembangan etika, dan menghasilkan warga negara yang baik. Sedangkan dalam jangka panjang, Bier dan Berkowitz (2005) menyebutkan penerapan pendidikan karakter dengan serius dan berkualitas akan membentuk generasi yang memiliki etika, bertanggung jawab, dan menjadi warga negara yang baik.

Sementara itu, keberhasilan pendidikan karakter di Indonesia belum terukur secara objektif. Studi komprehensif dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan meliputi seluruh wilayah Indonesia belum penulis dapatkan. Pertanyaannya adalah apakah pendidikan karakter ini bisa diukur keberhasilannya? Melinda and Berkowitz (2005) menelaah 78 artikel ilmiah yang merepresentasikan 39 program/ metode pendidikan karakter yang disebut efektif dan menyimpulkan bahwa mengukur keberhasilan pendidikan karakter itu tidak mudah, namun yang bisa disimpulkan adalah program pendidikan karakter bisa berjalan dengan sukses. Berikut beberapa komponen yang turut menentukan keberhasilan program pendidikan karakter.

1. Pengembangan profesional. Semua program yang efektif telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pengalaman latihan profesional yang terus menerus berlangsung selama penerapan pendidikan karakter.
2. Interaksi kelompok sebaya baik dikelas maupun dalam kelompok kecil misalnya dengan bermain peran atau *cooperative learning*.
3. *Direct teaching* atau instruksi langsung tentang karakter.

4. *Skill training*. Program yang dibentuk adalah mendukung dan bahkan mengajarkan secara langsung ketrampilan sosial-emosional, seperti interpersonal-intrapersonal.
5. *Explicit agenda*. Lebih dari separuh program yang efektif menyatakan fokusnya secara eksplisit tentang moralitas, nilai-nilai, nilai kebenaran dan etik yang akan dicapai.
6. *Family and community involvement*, dapat ditempuh dengan mengirimkan *newsletter* ke komunitas sehingga komunitas dapat menerapkan inisiatif pendidikan karakter ini.
7. Ketersediaan model yang akan menjadi contoh baik model kelompok sebaya maupun dewasa dan ketersediaan mentor dalam membentuk karakter.
8. Integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Hampir setengah program yang efektif mengintegrasikan pendidikan karakter dengan kurikulum menunjukkan hasil yang mencengangkan, yakni pendidikan karakter benar-benar mendukung pembelajaran akademis dan pencapaian prestasi.
9. Pendekatan strategi yang beragam, artinya jarang sekali program yang berhasil hanya mengandalkan 1 strategi.

Dari 33 program yang ditelaah, menurut Melinda *and* Berkowitz (2005) agar efektif perguruan tinggi paling tidak memerlukan 7 komponen strategi dari 9 komponen yang perlu diimplementasikan.

Uraian di atas memberikan gambaran, bahwa implementasi pendidikan karakter sebenarnya bisa dengan mudah diterapkan pada mahasiswa, karena setiap unit yang ada diperguruan tinggi mampu menampung pemberdayaan pendidikan karakter. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat, tidak hanya dosen sebagai pengampu mata kuliah, namun juga semua civitas akademika, orang tua, masyarakat, dan mahasiswa yang bersangkutan harus bisa bekerja sama dalam rangka pengimplementasian pendidikan karakter.

Terkait narasi itu, Yan, B. *and* Kunming (2018) dalam *Frameworks for Effective Character Education Practices, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 180, 2018 International Conference on Education Science and Social Development (ESSD 2018) memberikan gambaran bahwa keberhasilan untuk mempromosikan pengembangan kompetensi karakter dan sosioemosional pada mahasiswa akan bertumpu pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan kemudian secara efektif menerapkan praktik berbasis bukti; memprioritaskan pendidikan karakter secara otentik di perguruan tinggi; secara strategis dan sengaja mempromosikan hubungan positif di antara semua pemangku kepentingan kampus; memelihara internalisasi kekuatan karakter/nilai/kebijakan yang menghasilkan motivasi intrinsik; pemodelan karakter dan kompetensi sosial-emosional; memberdayakan semua pemangku kepentingan untuk menjadi pemilik bersama dan penulis bersama menjadi penting; menggunakan pedagogi perkembangan. Ini telah menyebabkan daftar 42 strategi implementasi pendidikan karakter yang memiliki bukti penelitian untuk mendukung efektivitasnya secara khusus dalam mempromosikan pengembangan karakter dan sosial-emosional akan berhasil.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi LPTK umumnya cukup berhasil mengimplementasikan pendidikan karakter yang ditandai dengan beberapa indikatornya, seperti 1) telah memiliki program pendidikan karakter secara baik, 2) memiliki beragam bentuk, pola, model, strategi, dan karya nyata terkait implementasi pendidikan karakter, 3) telah cukup berhasil dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, dan 4) pendanaan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan karakter.

#### B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, berikut beberapa saran. Pertama, LPTK perlu mengembangkan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan karakter. Pengembangan dapat dilakukan dengan menjadikan program internalisasi nilai-nilai sebagai mata rantai perkuliahan mata-mata kuliah dengan konten nilai yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua, implementasi pendidikan karakter yang ujung tombaknya ada pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, di setiap LPTK hendaknya memiliki tanggung jawab untuk menerapkan konsep dan rancangan pendidikan karakter mahasiswanya di kampus. Hal ini tentu memerlukan suatu perjuangan yang ulet, komitmen, kerja keras, dan konsisten dari para pihak tersebut agar bisa terealisasi dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asyanti, S. (2012). Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi: Sudah Terlambatkah? Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Psikologi Islami, *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami*, 2012.
- Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025
- Chrisiana, Wanda. (2005). *Upaya Penerapan Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa* (Studi Kasus di Jurusan Teknik Industri Uk Petra). *Jurnal Teknik Industri* Vol. 7, No. 1, Juni.
- Depdiknas. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Elias, M. (2010). "Qracter Education: Better Students Better People". *The Education Digest*. [www.proquest.umi.pqd/web](http://www.proquest.umi.pqd/web).
- Farida, Ida. (2012). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2012.
- Hasanah. 2013. *Implementasi Nilai-Nilai Karakter Inti di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun III, Nomor 2, Juni.

- Hidayat, R., dkk. (2014). eJournal *Administrative Reform*, 2(2): 1238-1250 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id.
- Hollingshead, B. (2009). [The Concerns-Based Adoption Model: A Framework for Examining Implementation of a Character Education Program](#), NASSP Bulletin, vol. 93, 3: pp. 166-183. , First Published December 28, 2009.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/22/14253761/diduga-ketahuan-bolos-sekolah-pelajar-di-depok-bunuh-diri?page=all>
- <http://kamus.sabda.org/kamus/hambatan> (Kamis/26/1/2017/ 11:59 wib)
- <http://penelitihukum.org/tag/definisi-lembaga-pendidikan-tenaga-kependidikan/diunggah> pada 29/11/2013 jam 10.15 wib
- (<http://www.antaraneews.com/berita/459406>).
- Ikhwanuddin. (2012). *Implementasi Pendidikan Karakter Kerja Sama dalam Perkuliahan*. [journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/download/1300/1081/](http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/download/1300/1081) Rabu/25/1/2017/ Pukul 2:26 wib)
- [Journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1291/](http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1291) Rabu/25/1/2017/ Pukul 2:38 wib.
- Kadarmanta, A. (2010). *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: Forum Media Utama.
- [Karakhanyan](#), S. Y., [van Veen](#), K. and [Bergen](#), T. C. M. (2012). [What Do Leaders Think? Reflections on the Implementation of Higher Education Reforms in Armenia](#), *Educational Management Administration & Leadership*, vol. 40, 6: pp. 752-771. First Published October 2, 2012.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter*.
- Khan, D. Y. (2010). *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*. Yogyakarta: Pelangi Publishing.
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2003). *CEP's Eleven principles of effective character education*. Washington, DC: Character Education Partnership.
- Lickona, T. (2004). *Character Matters*. New York: Soman & Schuster.
- Ma'ruf, H. (2012). *Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. [idr.iain-antasari.ac.id/6336/AlJami](http://idr.iain-antasari.ac.id/6336/AlJami), 8 (16). Juli-Desember. (Rabu/25/1/2017/Pukul 1:37).
- Mawitjere, P. Dalam <https://primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/Implementasi-kebijakan-publik-2/> (Selasa/24/1/2017/pukul 3:32 wib).
- [McIntosh](#), K., [Predy](#), L. K., [Upreti](#), G., [Hume](#), A. E., [Turri](#), M. G. and [Mathews](#), S. (2013). [Perceptions of Contextual Features Related to Implementation and Sustainability of School-Wide Positive Behavior Support](#), *Journal of Positive Behavior Interventions*, vol. 16, 1: pp. 31-43. , First Published January 9, 2013.

- Melinda, C. B., and Berkowitz, M.W. (2005). What Work in Character Education ? *Leadership For Students Activities*, October 2005, vol 34, no 2, page 1-7.
- Munir, A. (2010). *Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Mustoip, S., Japar, M. dan Zulela Ms. (2018). *Implementasi Pendidikan Karakter*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya .
- Nor, Baseran. Tanpa Tahun. *Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan IPS di Perguruan Tinggi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNLAM*.
- Nurchotimah, S. (2013). Implementasi Kurikulum Pendidikan Berkarakter di Sekolah, Makalah disajikan pada *Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Tahun 2013*.
- Prihantono, A. dalam <http://www.antaraneews.com/berita/459406/pendidikan-karakter-di-indonesia-banyak-hambatan> (kamis/12-1-2017/pukul 12.52 wib) Pendidikan karakter di Indonesia banyak hambatan.
- Priyono dan Maarif. (2010). *Penyusunan Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter*. Andi : Yogyakarta.
- Pusat Kurikulum. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Pedoman Sekolah*. Tidak Diterbitkan. Jakarta: Balitbang, Kemendiknas.
- Pusat Kurikulum. (2011). *Pengembangan Pendidikan Karakter*, Tidak Diterbitkan. Jakarta: Balitbang, Kemendiknas.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rai, I. B. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, *Beranda*, Vol. 28, No.2 (2016).
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Sasongko, D. (2010). *Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa dalam Rangka Membangun Peradaban Manusia*. Makalah disampaikan dalam Kegiatan Workshop Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa pada tanggal 30 Mei-2 Juni 2010 di Pusat Kurikulum.
- Samal, A. L. (2018). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah dan Perguruan Tinggi Melalui Pembelajaran Aktif, *Jurnal Pendidikan Islam Iqra* 'Vol. 11. Nomor 1, 2018.
- Shirley Yeung, S. Y. (2011). A School Evaluation Policy with a Dual Character: Evaluating the School Evaluation Policy in Hong Kong from the Perspective of Curriculum Leaders, *Educational Management Administration & Leadership*, vol. 40, 1: pp. 37-68. , First Published November 15, 2011.
- Siswanto, Heni Waluyo (2011). Pendidikan Karakter: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Implementasinya di Satuan Pendidikan, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan No.4 Tahun Ke-2 April 2011*.
- Sjarkawi. (2006). *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik. Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Uliana, P. dan Setyowati, Rr. N. (2013). Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kultur Sekolah pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1 Vol 1 Tahun 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
- Wiliandani, A. M., Wiyono, B. B. dan Sobri, A. Y. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Humaniora Vol. 4 No. 3, Hal 132-142, September 2016*.
- Winarni, S. (2013). *Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Perkuliahan*.
- Zulhijrah. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, *Tadrib*, Vol. 1 No.1 Juni 2015.
- Zuchdi, D. (2012). *Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional di FISE UNY, Selasa, 03 Januari 2012.

